

LAPORAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

Kantor 1 : Gajah Mada No. 1 Bantul
Kantor 2 : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bantul, Manding,
Trirenggo Bantul
Kode Pos – 55714 Telpon : (0274) 368302, 368778



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD5	
2.1 Kebijakan Umum APBD.....	5
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	20
4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	20
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN	21
5.1 Laporan Realisasi APBD	21
5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	28
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	31
BAB VII PENUTUP	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama akhir tahun dalam periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul selama akhir tahun dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Nomor: DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 Januari 2025;
- f. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Nomor: DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 21 Januari 2025;
- g. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Nomor: DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 5 Maret 2024;
- h. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Nomor: DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 17 April 2025;
- i. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Nomor:



DPPA/A.3/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 3 September 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang dibagi ke dalam delapan bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Kebijakan Umum dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang



Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum APBD Pemerintah Kabupaten Bantul secara keseluruhan. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat, penguatan tata kelola kearsipan yang tertib dan akuntabel, serta pengembangan literasi masyarakat. Belanja operasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan kegiatan rutin, meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang menunjang operasional perpustakaan dan kearsipan. Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana, peralatan, serta aset pendukung layanan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 juga dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Target Kinerja Kinerja Tahun 2025 mencerminkan program kegiatan tahunan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Target Kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025, dari semua indikator kinerja melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Pada tingkat sasaran strategi target kinerja dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misi .

Dalam tahun 2025 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan untuk mendukung visi dan misi. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui anggaran APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp2.289.734.271,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp809.955.000,- dengan pencapaian realisasi sebagai berikut:



Tabel 1. Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.784.920.426,00	5.007.942.556,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.985.000,00		
1	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	NILAI AKIP	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.485.000,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.188.022.423,00	4.426.855.808,00		
3	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.093.849.987,00	4.336.883.396,00	NILAI AKIP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
4	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.560.000,00	60.360.000,00	NILAI AKIP	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.612.436,00	29.612.412,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.291.675,00	154.536.300,00		
6	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.491.140,00	5.480.500,00	NILAI AKIP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
7	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.192.315,00	50.185.300,00	NILAI AKIP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan
8	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.999.520,00	9.996.100,00	NILAI AKIP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
9	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.242.700,00	13.068.000,00	NILAI AKIP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
10	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.493.000,00	NILAI AKIP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.816.000,00	42.663.400,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
12	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.650.000,00	29.650.000,00	NILAI AKIP	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.072.458,00	252.892.648,00		
13	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.200.000,00	14.824.104,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
14	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.650.000,00	28.490.000,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
15	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.222.458,00	209.578.544,00	NILAI AKIP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.533.870,00	186.776.100,00		



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.755.250,00	51.932.200,00	NILAI AKIP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
17	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.407.350,00	75.450.400,00	NILAI AKIP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
18	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.371.270,00	43.290.200,00	NILAI AKIP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
	02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.945.701.788,00	1.895.016.684,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.186.238.188,00	1.156.877.284,00		
19	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.357.500,00	136.832.000,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	749.733.908,00	743.908.644,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi
21	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	191.678.180,00	169.903.440,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keragaman koleksi perpustakaan
22	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.468.600,00	106.233.200,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	759.463.600,00	738.139.400,00		
23	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	548.150.800,00	527.456.600,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan
24	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	211.312.800,00	210.682.800,00	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	457.592.244,00	453.898.720,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	384.367.144,00	383.226.620,00		
25	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	224.477.400,00	224.470.100,00	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan
26	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	124.824.744,00	123.691.620,00	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan
27	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35.065.000,00	35.064.900,00	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	73.225.100,00	70.672.100,00		



No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Program (Outcome)	Keluaran Sub Kegiatan (Output)
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	73.225.100,00	70.672.100,00	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
	02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.324.800,00	5.324.800,00		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.324.800,00	5.324.800,00		
29	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.324.800,00	5.324.800,00	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
JUMLAH			8.193.539.258,00	7.362.182.760,00		



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran Program dan Kegiatan tersebut meliputi :

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 100%

- b. Subkegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99%

2. Kegiatan Adminitrasi Keuangan perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan :

- a. Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase pencapaian target kinerja sub kegiatan ini adalah 85,14%

- b. Subkegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Persentase pencapaian target kinerja sub kegiatan ini adalah 93,49%

- c. Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



Persentase pencapaian target kinerja sub kegiatan ini adalah 100%

3. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Subkegiatan :

- a. Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,81%

- b. Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,99%

- c. Subkegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,97%

- d. Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 98,68%

- e. Subkegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 89,56%

- f. Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,64%

- g. Subkegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 96,74%



4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan :

- a. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 97,53%

- b. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,44%

- c. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 98,75 %

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan :

- a. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 96,61%

- b. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 89,39%

- c. Subkegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,81%



3.1.2 Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 4 (empat) subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,62%
- b. Subkegiatan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,22%
- c. Subkegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 88,64%
- d. Subkegiatan: Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 98,85%

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 96,22%
- b. Subkegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,70%

3.1.3 Program Pengelolaan Arsip terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota

terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 100%
- b. Subkegiatan: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 99,09%
- c. Subkegiatan: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 100%

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupten/ Kota

terdiri dari 1 (satu) subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 96,51%

3.1.4 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdiri 1 (satu) kegiatan:

1. Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun terdiri dari 1 (satu) subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Persentase pencapaian target kinerja subkegiatan ini adalah 100%



3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pencapaian target yaitu:

- a. Akses layanan perpustakaan belum merata/ belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul;
- b. Jumlah dan kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan belum optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
- d. Kinerja dan fungsi Arsiparis di Perangkat Daerah kurang optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib membuat dan menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan berkaitan dengan anggaran/barang yang dikelola kepada Entitas Pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sepenuhnya terutama menyangkut penilaian aset tetap yang telah sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan namun belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi APBD

Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 190, Laporan Keuangan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan dan bukan OPD Pengguna Pembiayaan Daerah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar Rp8.193.539.258,- terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar Rp7.920.089.258,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp5.093.849.987,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.826.239.271,-.
- Belanja Modal sebesar Rp273.450.000,-.



Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp7.362.182.760,- terdiri dari:

- Belanja Operasi sebesar Rp7.091.260.760,- dari Belanja Pegawai sebesar Rp4.336.883.396,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.754.377.364,-
- Belanja Modal sebesar Rp270.922.000,-.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Akhir Tahun Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasional

Tabel 2. Belanja Operasional

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.093.849.987,00	4.336.883.396,00	756.966.591,00	85,14%
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.826.239.271,00	2.754.377.364,00	71.861.907,00	97,46%
	Jumlah	7.920.089.258,00	7.091.260.760,00	828.828.498,00	89,54%

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bantul guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3. Belanja Modal

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.450.000,00	180.922.000,00	2.528.000,00	98,62%
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100%
	Jumlah	273.450.000,00	270.922.000,00	2.528.000,00	99,08%



Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terinci sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA** terdiri dari 5 (lima) kegiatan:

**(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah** terdiri dari 2 (dua) Subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dari alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000,- terealisasi Rp1.500.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,-
- b. Subkegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dari alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000,- terealisasi Rp1.485.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.000,-

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dari alokasi anggaran sebesar Rp5.093.849.987,- terealisasi Rp4.336.883.396,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp756.966.591,-
- b. Subkegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dari alokasi anggaran sebesar Rp64.560.000,- terealisasi Rp60.360.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.200.000,-
- c. Subkegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Dari alokasi anggaran sebesar Rp29.612.436,- terealisasi Rp29.612.412,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp24,-



(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 (tujuh) Subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dari alokasi anggaran sebesar Rp5.491.140,- terealisasi Rp5.480.500,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.640,-
- b. Subkegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari alokasi anggaran sebesar Rp50.192.315,- terealisasi Rp50.185.300,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.015,-
- c. Subkegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dari alokasi anggaran sebesar Rp9.999.520,- terealisasi Rp9.996.100,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.420,-
- d. Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dari alokasi anggaran sebesar Rp13.242.700,- terealisasi Rp13.068.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp174.700,-
- e. Subkegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dari alokasi anggaran sebesar Rp3.900.000,- terealisasi Rp3.493.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.407.000,-
- f. Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dari alokasi anggaran sebesar Rp42.816.000,- terealisasi Rp42.663.400,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp152.600,-
- g. Subkegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



Dari alokasi anggaran sebesar Rp30.650.000,- terealisasi Rp29.650.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.000.000,-

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan:

a. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dari alokasi anggaran sebesar Rp15.200.000,- terealisasi Rp14.824.104,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp375.896,-

b. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dari alokasi anggaran sebesar Rp28.650.000,- terealisasi Rp28.490.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp160.000,-

c. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dari alokasi anggaran sebesar Rp212.222.458,- terealisasi Rp209.578.544,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.643.914,-

(5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan:

a. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dari alokasi anggaran sebesar Rp53.755.250,- terealisasi Rp51.932.200,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.823.050,-

b. Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Dari alokasi anggaran sebesar Rp84.407.350,- terealisasi Rp75.450.400,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.956.950,-

- c. Subkegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari alokasi anggaran sebesar Rp43.371.270,- terealisasi Rp54.159.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp81.070,-

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

(1) Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Subkegiatan:

- a. Subkegiatan: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari alokasi anggaran sebesar Rp137.357.500,- terealisasi Rp136.832.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp525.500,-

- b. Subkegiatan: Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

Dari alokasi anggaran sebesar Rp749.733.908,- terealisasi Rp743.908.644,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.825.264,-

- c. Subkegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Dari alokasi anggaran sebesar Rp191.678.180,- terealisasi Rp169.903.440,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.774.740,-

- d. Subkegiatan: Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota



Dari alokasi anggaran sebesar Rp107.468.600,- terealisasi Rp106.233.200,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.235.400,-

(2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:

- a. Subkegiatan: Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Dari alokasi anggaran sebesar Rp85.895.000,- terealisasi Rp85.745.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp150.000,-

- b. Subkegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dari alokasi anggaran sebesar Rp10.390.675.000,- terealisasi Rp10.341.488.940,02 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp49.186.059,98

- c. Subkegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Dari alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,- terealisasi Rp60.000.000,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,-

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

(1) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan:

- a. Subkegiatan: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Dari alokasi anggaran sebesar Rp38.153.500,- terealisasi Rp38.153.500,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,-

- b. Subkegiatan: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Dari alokasi anggaran sebesar Rp148.229.200,- terealisasi Rp147.634.939,28 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp594.260,72



- c. Subkegiatan: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota

Dari alokasi anggaran sebesar Rp28.232.300,- terealisasi Rp28.232.300,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,-

(2) Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan:

- a. Subkegiatan: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Dari alokasi anggaran sebesar Rp46.859.900,- terealisasi Rp46.836.350,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.550,-

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

(1) Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun terdiri dari 1 (dua) Sub Kegiatan:

- a. Subkegiatan: Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Dari alokasi anggaran sebesar Rp9.999.800,- terealisasi Rp9.999.800,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.0,-

5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- (nihil)

2) Persediaan

Jumlah persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.078.500,- dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4. Mutasi Persediaan Tahun 2025

NO.	Nama Barang	Saldo Awal 2025 (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
1	Bahan Kimia	620.000,00	4.440.200,00	4.550.200,00	510.000,00
2	Bahan Bakar Dan Pelumas	0,00	96.805.900,00	96.805.900,00	0,00
3	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
4	Alat Tulis Kantor	1.336.100,00	25.699.500,00	24.962.500,00	2.073.100,00
5	Kertas Dan Cover	1.238.800,00	55.250.000,00	54.547.900,00	1.940.900,00
6	Bahan Cetak	1.702.000,00	19.868.000,00	19.440.000,00	2.130.000,00
7	Benda Pos	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
8	Bahan Komputer	0,00	29.790.000,00	28.830.000,00	960.000,00
9	Perabot Kantor	213.500,00	82.597.200,00	82.529.200,00	281.500,00
10	Alat Listrik	0,00	5.480.500,00	5.297.500,00	183.000,00
11	Suvenir/Cendera Mata	1.000.000,00	67.400.000,00	68.400.000,00	0,00
12	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00
13	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	0,00	169.367.500,00	169.367.500,00	0,00
TOTAL		6.549.400,00	557.778.800,00	556.249.700,00	8.078.500,00

5.2.2 Aset Tetap

Tabel 5. Aset Tetap

Nama Aset	Saldo Awal 2025 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Des 2025 (Rp)
a. Tanah	248.624.000,00	248.624.000,00
b. Peralatan & mesin	7.009.430.499,00	6.334.914.019,00
c. Gedung dan bangunan	16.277.566.590,00	11.821.704.140,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	155.391.800,00	52.705.000,00
e. Aset tetap lainnya	4.072.323.855,00	4.150.705.740,00
f. Aset tidak berwujud	430.502.900	430.502.900,00



5.2.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Nihil

SILPA belanja langsung per 31 Desember 2025 sebesar
Rp831.356.498,-



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Dinas Perpustakaan Kearsipan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125 Tahun 2016
- b. Dasar hukum
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
 - Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul
- c. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - (a) perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan ;



- (c) pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- (d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- (e) pelaksanaan administrasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; dan
- (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (g) perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.



BAB VII

PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bantul telah melaksanakan 4 (empat) Program sebanyak 10 (sepuluh) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Subkegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 beserta target yang telah ditentukan.
2. Belanja Operasi sebesar Rp7.920.089.258,- terealisasi sebesar Rp7.091.260.760,- atau 89,54% dengan sisa Rp828.828.498,-.
 - Belanja Pegawai sebesar Rp5.093.849.987,- terealisasi sebesar Rp4.336.883.396,- atau 85,14% dengan sisa Rp756.966.591,-.
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.826.239.271,- terealisasi sebesar Rp2.754.377.364 atau 97,46% dengan sisa Rp71.861.907,-
3. Belanja Modal sebesar Rp273.450.000,- terealisasi sebesar Rp270.922.000,- atau 99,08% dengan sisa Rp2.528.000,-.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp183.450.000,- terealisasi sebesar Rp180.922.000,- atau 98,62% dengan sisa Rp2.528.000,-
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0% dengan sisa Rp0,-
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp90.000.000,- terealisasi sebesar Rp90.000.000,- atau 100% dengan sisa Rp0,-
4. Dari Anggaran Belanja Daerah Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.193.539.258,- realisasinya mencapai Rp7.362.182.760,- atau **89,85%** dengan sisa sebesar Rp831.356.498,-.
5. Hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan :



- Akses layanan perpustakaan belum merata/ belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul;
- Jumlah dan kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan belum optimal;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip di Perangkat Daerah;
- Kinerja dan fungsi Arsiparis di Perangkat Daerah kurang optimal.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Bantul, 19 Januari 2026

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang



Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH., MM

NIP. 196911121996032003